



Seiring dengan meluasnya jangkauan kegiatan sosial yang terus disalurkan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia serta besarnya dorongan masyarakat luas untuk bekerjasama dalam memberdayakan bangsa, maka pada tahun 2004, PKPU bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia dengan memperluas lingkup kerjanya sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional.

Kiprah PKPU sebagai pegiat kemanusiaan terakhir jelas dalam partisipasinya berdampingan dengan NGO Internasional dari manca neagra mengatasi keadaan darurat tanggap bencana serta fase pembangunan kembali bencana-bencana besar yang menimpa tanah air kita seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, Yogyakarta, dan beberapa peristiwa lainnya.

Sebagai lembaga yang semakin kokoh dalam menangani isu-isu kemanusiaan global makan tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan program telah mencambuk PKPU untk mengedepankan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. Tuntutan tersebut dijawab dengan diterimanya PKPU sebagai “NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations” pada 21 Juli 2008, yang menuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan secara periodik sebagai konsekuensi status yang di sandang. Kemudian pada tahun 2012, PKPU juga telah





















hubungan kemitraan sudah selesai. Oleh karena itu, tujuan dalam hubungan kemitraan harus jelas dan terukur.

Dalam wawancara yang saya kutip di atas Ibu Lutfiyah juga mengungkapkan bahwa untuk menjadi mitra yang baik, kita harus selalu fokus pada tujuan kemitraan. Kita harus mampu menciptakan pandangan positif dari pihak yang bermitra melalui kualitas yang diberikan oleh PKPU. Jadi, tujuan yang akan dicapai dalam hubungan kemitraan tersebut harus jelas dan terukur.

Ibu Lutfiyah selaku kepala bidang pendayagunaan di PKPU Surabaya memaknai kemitraan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang dengan tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang lebih baik. Keuntungan yang didapatkan oleh PKPU selaku pihak pertama dan perusahaan yang bermitra pihak kedua menjadi salah satu pondasi yang menguatkan dalam membangun hubungan kemitraan. Apabila ada salah satu pihak kemitraan yang merasa dirugikan atau merasa tidak mendapatkan manfaat dari terbangunnya kemitraan. Maka hal itu akan merusak hubungan kemitraan yang sudah terjalin. Antara pihak yang bermitra harus merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kemitraan. Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Deni,

“Sebenarnya keuntungan itu merupakan hal wajib dalam membangun kemitraan. Kalau tidak ada keuntungan ya buat apa dilakukan hubungan kemitraan. Kalau keuntungan dari kemitraan buat PKPU ya salah satunya bisa mencapai tujuan PKPU yaitu





melaksanakan kemitraan usaha untuk mendapatkan modal, terkadang untuk keahlian tertentu, ada yang memperluas koneksi, bahkan ada yang membutuhkan SDM dan lain sebagainya.

Dalam hubungan kemitraan antara PKPU dengan perusahaan ada dua hal yang dibutuhkan satu sama lain. Pertama, PKPU membutuhkan dana untuk melaksanakan programnya. Kedua, perusahaan membutuhkan SDM untuk melaksanakan program CSRnya. Jika kedua hal ini tidak terpenuhi untuk kedua pihak, maka hubungan kemitraan bisa menjadi renggang. Dengan kata lain salah satu dasar terbentuknya kemitraan di PKPU adalah saling membutuhkan antara pihak yang bermitra. PKPU selalu mencari tahu apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, misalnya ada suatu perusahaan yang ingin pempublikasian. Maka, PKPU sebagai pihak pertama harus memenuhi kebutuhan dari perusahaan yang menjadi pihak kedua. Sebaliknya, PKPU membutuhkan dana untuk melaksanakan program CSRnya, maka perusahaan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan PKPU. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Deni selaku manager divisi CSR di PKPU Surabaya,

“Ada, Pertamina itu salah satunya ada itu yang, dia selalu minta ke kita ketika selesai melaksanakan program CSR mereka minta, mas kalau ada launching program nanti dipublikasikan ke media ya. Dalam membangun kemitraan itu kita harus mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka itu apa. Kan disini PT. Pertamina ingin pencitraan. Salah satunya lewat media sosial. Ya kita mau gak mau harus memenuhi kebutuhan mereka kalau kita ingin kemitraan terus berlanjut. Dan kalau kita butuh apa-apa misalnya dana ya kita







bermitra. Dalam memulai hubungan kemitraan diperlukan adanya kesiapan dari pihak yang akan bermitra. Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk menuju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra.

Komitmen dalam kemitraan di PKPU bisa dilihat seberapa besar rasa loyaltasnya, keterlibatannya, waktu, tenaga dan hal lainnya yang disumbangkan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua dalam melaksanakan program yang sudah di mitrakan. Apabila suatu organisasi yang sudah berkomitmen dan membuktikan komitmen bisa diartikan organisasi tersebut mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan bisa dikatakan sebagai organisasi yang baik. Komitmen sangat diperlukan dalam keberlangsungan program yang di mitrakan di PKPU Surabaya. Komitmen hanya dapat terwujud jika setiap mitra bisnis menjunjung tinggi nilai integritas dalam berkomitmen. Seperti yang dicetuskan oleh Bapak Puput tentang perlunya komitmen dalam keberlanjutan suatu hubungan kemitraan. Beliau mengutarakan,

“Kalau komitmen dalam hubungan kemitraan memang sangat diperlukan. Eeee komitmen itu bisa dikatakan sebagai suatu sikap kerelaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, SDM atau hal-hal lain dalam kelangsungan sebuah hubungan kemitraan. Selama ini sih kita aman-aman saja, selama kita bisa memenuhi segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah tertera dalam *MoU*. Maka komitmen kita sudah dianggap bagus. Lain halnya ketika kita tidak memenuhi hak, kewajiban dan tanggung jawab yang









program yang sudah di mitrakan. Perjanjian kemitraan ini merupakan kontrak kesepakatan antara PKPU dan perusahaan yang bermitra dalam suatu program tertentu. Surat perjanjian ini juga merupakan bentuk profesionalisme kerja antara PKPU dan perusahaan yang bermitra. Dengan adanya surat perjanjian, maka kedua pihak mitra harus bisa bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Isi dokumen dalam surat perjanjian dan setiap perubahan yang terjadi harus secara resmi diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh PKPU dan mitranya.

Bentuk kesepakatan PKPU dan perusahaan yang bermitra dituangkan dalam bentuk *MoU*. *MoU* disini berisi tentang hak yang harus didapatkan oleh pihak yang bermitra. Kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, tentu akan menjadikan mitra bisa mendapatkan posisinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dia miliki. Bukan hanya itu, di dalam *MoU* dijelaskan terperinci juga tentang lokasi, anggaran biaya untuk program yang akan dilaksanakan. Di dalamnya juga dijelaskan tentang jangka waktu terikatnya kemitraan. *MoU* pun dijadikan sebuah acuan untuk memberikan komitmennya dalam bermitra. Hal ini selaras dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Hermansyah. Berikut pernyataannya,

“Kesepakatan ini kan dituangkan dalam *MoU*. Nah di dalamnya itu sudah ada isi tentang kewajiban dan hak dari masing-masing pihak.















yang diberikan kepada perusahaan, diharapkan mampu untuk membangun kemitraan lagi dengan PKPU.

Hal kelima yang menjadi andalan PKPU dalam membangun kemitraan dengan perusahaan adalah pemberian layanan khusus kepada perusahaan yang bermitra. PKPU sebagai lembaga amil zakat mempunyai dua devisi. Yang pertama adalah devisi zakat dan kedua adalah devisi CSR. Dalam memulai hubungan kemitraan dengan mitra PKPU selalu menjelaskan bahwa PKPU mempunyai devisi dan SDM yang berkompeten khusus untuk menangani dana CSR yang digelontorkan ke PKPU. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang membuat kekhasan tersendiri dan bisa menambah tingkat kepercayaan dari perusahaan yang akan bermitra dengan PKPU. Dalam wawancara, Bapak Puput mengungkapkan sebagai berikut,

“Ya, kalo dalam ruang lingkup CSR ya, mmmhhh PKPU itu, alhamdulillah kita punya devisi sendiri yang memang khusus untuk menangani terkait dengan CSR. Jadi, kalo setahu saya kalau di lembaga amil zakat lainnya tidak ada yang mungkin untuk penanganan CSR, bahkan kompetensinya pun itu bisa dibilang belum ada. Jadi, kalau di PKPU sendiri secara personal SDMnya, kompetensinya memang memumpuni untuk di bidang CSR dan PKPU juga mempunyai semacam res kopes standart semacam prosedur kegiatan CSR seperti apa kemudian kompetenya pun sudah mendukung. Intinya Jadi, ketika kami membangun kemitraan dengan perusahaan itu tentu itu menjadi pertimbangan. Secara pengalaman untuk penanganan program-program CSR sendiri pun juga kami jauh lebih banyak dan juga temen-temen . Jadi, bedanya kami lebih ke penyediaan devisi khusus dan SDM yang kompeten dalam mengurus dana CSR yang digelontorkan







2. Keaktifan individu dalam mencari peluang kemitraan di ruang informal.
3. Adanya sinergi antara PKPU Surabaya dengan cabang-cabang se Indonesia dan pusat PKPU di Jakarta.
4. Menjalani komunikasi intens dengan para mitra meskipun kontrak sudah habis dengan mengadakan acara seperti workshop, seminar dan *gathering*.
5. Mengidentifikasi serta menganalisa karakter dan keinginan atau kebutuhan dari perusahaan.
6. Penceritaan *success story* dan keberhasilan staff PKPU Surabaya dalam menjalankan program CSR.

Pertama, *service excellent* yaitu memberikan layanan prima kepada perusahaan yang bermitra. Pelayanan prima ini menjadi salah satu perbedaan antara PKPU dengan lembaga amil zakat lainnya. Dalam wawancara, Bapak Puput mengungkapkan sebagai berikut,

“Ya, kalau dalam ruang lingkup CSR ya, mmhh PKPU itu, alhamdulillah kita punya divisi sendiri yang memang khusus untuk menangani terkait dengan CSR. Jadi, kalo setahu saya kalau di lembaga amil zakat lainnya tidak ada yang mungkin untuk penanganan CSR, bahkan kompetensinya pun itu bisa dibilang belum ada. Jadi, kalau di PKPU sendiri secara personal SDMnya, kompetensinya memang mempunyai untuk di bidang CSR dan PKPU juga mempunyai semacam res kopes standart semacam prosedur kegiatan CSR seperti apa kemudian kompetensinya pun sudah mendukung. Intinya Jadi, ketika kami membangun kemitraan dengan perusahaan itu tentu itu menjadi pertimbangan. Secara pengalaman untuk penanganan program-program CSR sendiri pun juga kami jauh lebih banyak dan juga teman-teman. Jadi, bedanya kami lebih ke penyediaan divisi khusus dan SDM yang kompeten dalam mengurus















